LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) PUD BPR BANK KARANGANYAR TAHUN 2022

JL Lawu Timur No.135 Karanganyar
TELEPON: (0271) 495489

PUD BPR BANK KARANGANYAR
JL Lawu Timur No.135 Karanganyar
Telepon: (0271) 495489
Website: www.bankkaranganyar.co.id. Email: info@bankkaranganyar.coi.id

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PUD BPR BANK KARANGANYAR Tahun 2022

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
2. POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
3. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
4. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PUD BPR BANK KARANGANYAR selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Karanganyar, 25 Januari 2023

PUD BPR BANK KARANGANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PUD. BPR
Bank Karanganyar

Wisnu Wardana, SE, MM
Direktur Utama

Zulfikar Hadidh, SH
Ketua Dewan Pengawas

BAB I
PENJELASAN UMUM

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip – prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik.

Penerapatan Tata Kelola yang baik (GCG- Good Cprporate Govermance) pada PUD BPR Bank Karanganyar pada tahun 2022, telah membawa perkembangan positif dengan meningkatkan kinerja BPR, meskipun mengahadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2022 di tengah pemulihan atas dampak atas pandemi COVID - 19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

PUD.BPR Bank Karanganyar memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Kabupaten Karanganyar. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Wisnu Wardana, SE, MM
	NIK	:	3313090211710003
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Pedoman dan TataTertib Kerja Direksi ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 4. Direksi menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PUD BPR Bank Karanganyar kepada KPM melalui Dewan Pengawas meliputi bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan. 5. Difeksi wajib melaksanakan prinsip- prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang Organisasi Bank. 6. Anggota Direksi mengahadiri semua rapat Direksi dan rapat rutin kerja yang relevan pada bidangnya. 7. Direksi wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang Organisasi. 8. Direksi wajib memastikan BPR memiliki kebijakan dan Prosedur APU dan PPT dan mengawasi penerapannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.		
2.	Nama	:	Deni Susilo, SH
	NIK	:	3313092810740001
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Pedoman dan TataTertib Kerja Direksi ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 4. Direksi menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PUD BPR Bank Karanganyar kepada KPM melalui Dewan Pengawas meliputi bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.		

	5. Difeksi wajib melaksanakan prinsip- prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang Organisasi Bank. 6. Anggota Direksi mengahadiri semua rapat Direksi dan rapat rutin kerja yang relevan pada bidangnya. 7. Direksi wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang Organisasi. 8. Direksi wajib memastikan BPR memiliki kebijakan dan Prosedur APU dan PPT dan mengawasi penerapannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :	
Terdapat Rapat Direksi dengan Dewan Pengawas	
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Zulfikar Hadidh, SH
	NIK	:	3313091103750002
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap PUD BPR Bank Karanganyar dan mengawasi, memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Bank. 2. Dewan Pengawas melakukan pengawasan kedalam tanpa mengurangi pengawasan luar serta melakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu. 3. Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Dewan' Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan Satuan Kerja Audit dan rekomendasi dari DIvisi Audit lnternal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 5. Dewan Pengawas menyetujuilmenolak memberikan rekomendasi penghapusbukuan (write off) maupun penghapustagihan atas piutang yang diajukan oleh Direksi apabila melebihi kewenangannya. 6. Anggota Dewan Pengawas melaksanakan tugas serta mempunyai fungsi, sebagai berikut : Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PUD.BPR Bank Karanganyar, Pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PUD. BPR Bank Karanganyar, Pembinaan dan pengembangan PUD.BPR Bank Karangayar. 7. Dewan Pengawas dalam melakanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Peraturan Daerah, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
2.	Nama	:	Bambang Sutarmanto, S.Sos, MM
	NIK	:	3313102903650001
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap PUD BPR Bank Karanganyar dan mengawasi, memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Bank.		

	2. Dewan Pengawas melakukan pengawasan kedalam tanpa mengurangi pengawasan luar serta melakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu. 3. Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Dewan' Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan Satuan Kerja Audit dan rekomendasi dari Dlvisi Audit lnternal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 5. Dewan Pengawas menyetujuilmenolak memberikan rekomendasi penghapusbukuan (write off) maupun penghapustagihan atas piutang yang diajukan oleh Direksi apabila melebihi kewenangannya. 6. Anggota Dewan Pengawas melaksanakan tugas serta mempunyai fungsi, sebagai berikut : Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PUD.BPR Bank Karanganyar, Pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PUD. BPR Bank Karanganyar, Pembinaan dan pengembangan PUD.BPR Bank Karangayar. 7. Dewan Pengawas dalam melakanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Peraturan Daerah, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rekomendasi Kepada Direksi :	
Mengadakan Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi	
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Bank tidak memiliki komite audit, komite pemantauan risiko dan komite remunerasi & nominasi	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Nihil		

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Wisnu Wardana, SE, MM	3313090211710003	Rp0,00	0%
2.	Deni Susilo, SH	3313092810740001	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Wisnu Wardana, SE, MM	3313090211710003	-	-	0%
2.	Deni Susilo, SH	3313092810740001	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Wisnu Wardana, SE, MM	3313090211710003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Deni Susilo, SH	3313092810740001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas dan Pemegang Saham					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Wisnu Wardana, SE, MM	3313090211710003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Deni Susilo, SH	3313092810740001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas dan Pemegang Saham					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Zulfikar Hadidh, SH	3313091103750002	Rp0,00	0%
2.	Bambang Sutarmanto, S.Sos, MM	3313102903650001	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Zulfikar Hadidh, SH	3313091103750002	-	-	0%
2.	Bambang Sutarmanto, S.Sos, MM	3313102903650001	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain					

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Zulfikar Hadidh, SH	3313091103750002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bambang Sutarmanto, S.Sos, MM	3313102903650001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas dan Pemegang Saham					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Zulfikar Hadidh, SH	3313091103750002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bambang Sutarmanto, S.Sos, MM	3313102903650001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas dan Pemegang Saham					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp128.257.350,00	2	Rp79.804.576,00
2.	Tunjangan	2	Rp495.061.724,00	2	Rp131.366.837,00
3.	Tantiem	2	Rp61.313.758,00	1	Rp10.900.242,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp403.680.788,00	2	Rp78.698.120,00
Total			Rp1.088.313.620,00		Rp300.769.775,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Penghasilan Angota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Periode Tahun 2022					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
NIhil			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.13 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.5 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji berdasarkan gaji yang diterima tahun 2022	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	14 Maret 2022	9	Pembahasan Hak Kios PUD Bank Karanganyar di Pasar klodran
2.	04 April 2022	9	Pembahasan rencana penggunaan ATM Cardless
3.	30 Juni 2022	9	Pembahasan Rencana Pengembangan dan Pengadaan Informasi yang bersifat mendasar
4.	13 Juli 2022	38	Pembinaan oleh Dewan Pengawas dan Kabag

			Perekonomian
5.	14 September 2022	6	Pembahasan Surat dari Kantor Pajak Madya Surakarta Nomor SP2DK209/WPJ32/KP.13/2022 dan Nomor SP2DK210/WPJ32/KP.13/2022
6.	23 September 2022	4	Pembahasan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan atau Kantor Akuntan Publik (KAP)
7.	06 Oktober 2022	13	Pembahasan Penghapusan Piutang Macet Tahun 2022
8.	14 Desember 2021	3	Pembahasan RBB dan persetujuan RBB 2022
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Pengwas sudah mengadakan rapat dalam 1 tahun membahas tindak lanjut perusahaan dan isu-isu strategis tetapi ada sebagian rapat yang tidak ternotulen			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Zulfikar Hadidh, SH	3313091103750002	8	0	100%
2.	Bambang Sutarmanto, S.Sos, MM	3313102903650001	8	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Kehadiran rapat Dewan Pengawas ternotulen dan mengisi daftar hadir					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Nihil								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									

Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
NIhil					

Karanganyar, 25 Januari 2023

PUD BPR BANK KARANGANYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR PUD. BPR Bank Karanganyar

Wisnu Wardana, SE, MM
Direktur Utama

Zulfikar Hadidh, SH
Ketua Dewan Pengawas